



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 242 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. bahwa dikarenakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 saat ini masih dalam proses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan/atau evaluasi di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, sehingga penetapannya tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka sambil menunggu ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, untuk membiayai pengeluaran Daerah dipergunakan angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sesuai ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 105A dan Pasal 106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  11. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
  12. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

- (1) Untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mendahului penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017, dipergunakan setinggi-setingginya angka APBD Tahun Anggaran 2016 sebagai dasar dalam melaksanakan Pengeluaran Daerah.

- (2) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk membiayai kebutuhan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, meliputi :
- a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil/ Gubernur/Wakil Gubernur;
  - b. Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - c. Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah dan Tunjangan Transport Pejabat (Pengganti KDO Pejabat);
  - d. Pembayaran Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;
  - e. Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - f. Pembayaran Utang Pokok dan Bunga Pinjaman;
  - g. Pembayaran Telepon, Air, Listrik, Internet, Gas, Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK), Jasa Service, Penggantian Suku Cadang, Pengelolaan Air Limbah, Jasa Kebersihan (Cleaning Service), Rekening Penerangan Jalan Umum (PJU), Jasa Pencucian Pakaian (Laundry Rumah Sakit), Laundry Graha Wisata, Peserta Diklat Aparatur yang Menginap, Jasa Jalan/Tol, Penyediaan Belanja Cetak Umum, Penyediaan Belanja Cetakan Khusus, Penyediaan Jasa Keamanan Kantor, Jasa Administrasi Keuangan;
  - h. Pembayaran Premi Peserta PBI Daerah;
  - i. Pembayaran Honorarium Pegawai Tidak Tetap, Biaya Pengamanan dan Perlindungan Masyarakat (OP PTT Satpol PP), Pelaksanaan Tugas Pegawai Tidak Tetap (PTT), Honorarium Jasa Petugas Penanganan Kebersihan, Penanganan Sampah Sungai, Waduk, Situ, Saluran Penghubung, Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan, Pengadaan Jasa Pegawai Harian Lepas (PHL), Penyediaan Jasa Petugas Teknik Kontrak Individu (PTKI) Pencahayaan Kota, Pengembangan Pemberdayaan SDM Non PNS Kesehatan, Peningkatan Layanan Umum Daerah (Belanja BLUD), Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS di Sekolah Negeri, Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Badan Manajemen dan Badan Pembina PPPIJ, Penguasaan Kelembagaan PKK (Honor Kader PKK), Pendampingan Kegiatan UP Sistem Jalan Berbayar Elektronik;
  - j. Pembayaran Operasional BLUD, Operasional SMAN Unggulan MH Thamrin, Operasional Boarding School SMAN 69 Kepulauan Seribu, Operasional Pelaksanaan PPDB SD, SMP, SMA/SMK, Pemeliharaan/Perbaikan Kendaraan Dinas, Belanja Material/Operasional Kendaraan Dinas Darat/Laut, Alat Berat dan Pompa, Bahan Bakar Minyak/BBM antara lain BBM Genset, BBM Operasional Kendaraan Dinas, BBM

Operasional Kapal, BBM Pemadam Kebakaran, BBM Truk Sampah, BBM Kendaraan Antar Jemput Karyawan, BBM Operasional Kendaraan Ambulans, BBM Operasional Kendaraan Jenazah, BBM Bus Sekolah, Operasional Bus Sekolah, Operasional Kapal serta Operasional Kereta Wisata Monas dan BBM Operasional Kendaraan Layanan Perpustakaan dan Arsip, BBM Pemeliharaan Mesin Rumput, Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus;

- k. Pembayaran Jamuan Makan Tamu Gubernur, Makan Penghuni Panti, Makanan Pasien dan Pegawai Rumah Sakit, Makanan Atlet PPOP, Makan dan Minum Petugas Call Center SPGDT 119, Pangan Korban Banjir/Kebakaran, Makan Minum Harian Pegawai, Makan Minum Rapat dan Makan Minum Peserta/Petugas/Panitia;
- l. Pengadaan Pakan dan Obat-obatan Hewan Kebun Binatang Ragunan serta Pakan dan Obat-obatan Hewan Ternak Lainnya, Obat-obatan Kolam Renang;
- m. Pengadaan Bahan Alat Kesehatan Pakai Habis, Pemeliharaan Alat-alat Penunjang Medik, Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran Umum, Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan RSUD Adhyaksa;
- n. Pembayaran Kejadian Bencana untuk Penanggulangan Bencana dan KLB Penyakit, Obat-obatan, Biaya Operasional Pendidikan (BOP), BOP dan BOS Sekolah Negeri, Belanja Hibah (BOP PAUD, BOP Madrasah, BOS Swasta) serta Bantuan Sosial (Bantuan Personal Siswa Miskin/KJP dan KJMU), Demam Berdarah Dengue (DBD), Flu Burung/Flu Babi, Diare Massal, Biaya Operasional Wajib Belajar 12 Tahun Sekolah Swasta, Penyelenggaraan Dapur Umum Bagi Korban Bencana, Pemeliharaan DIMS dan Pengelolaan Website BPBD Provinsi DKI Jakarta, Penyediaan Jaringan Komunikasi Penanggulangan Bencana, Pelayanan Pengendalian Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta, Piket Siaga Bencana Daerah BPBD Provinsi DKI Jakarta, Penyediaan Perlengkapan Penanganan Bencana Daerah;
- o. Pembayaran Pengamanan dan Gangguan Gejolak Sosial/Kejadian Luar Biasa (KLB);
- p. Pemeliharaan Berkala Jalan, Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan, Penerangan Jalan Tingkat Kelurahan;
- q. Pemeliharaan Lampu Lalu Lintas, Pemeliharaan Lampu PJU, Pemeliharaan/Perbaikan Instalasi Pengolah Air (Sistem RO), Pemeliharaan/Perbaikan Jaringan Distribusi Listrik Tegangan Menengah dan Rendah serta Gardu Listrik, Pengawasan Bangunan, Pengenaan Sanksi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, Penyelenggaraan Bangunan, Pemeliharaan dan Pengamanan Taman, Jalur Hijau serta Sarana/Prasarananya, Air Mancur serta Keindahan Kota, Pemeliharaan dan Pengamanan TPU, Pengelolaan Pompa Stasioner, Pompa Mobile, Pintu Air, Bangunan Rumah Pompa serta Rumah

Jaga dan Kelengkapannya, Perawatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Kebersihan, Normalisasi dan Refungsi Sungai/Kali, Pemantauan Kualitas Udara dan Air, Pemeliharaan Sistem Pemantau Lalu Lintas, Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kota, Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi, Pengendalian Lalu Lintas pada Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, Pendampingan Kegiatan Dinas Perhubungan dan Transportasi;

- r. Pembayaran Analisa Berita Media Massa, Pengelolaan dan Pengembangan Website, Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Portal Berita Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemeliharaan Server Data Center, ATS Aplikasi Perekaman Sidik Jari (Aplikasi KTP-el), Perekaman Register Akta Berbasis TI, Pengelolaan Publikasi Berbasis Media Tercetak dan Media Luar Ruang, Pengembangan dan Pengelolaan Kemitraan dan Kerja Sama Kehumasan, Pengelolaan Jakarta One Card, Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Disaster Recovery Center (DRC), Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Metropolitan Area Network, Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Security Network System, Pengadaan dan Pemeliharaan Database dan Aplikasi Software, Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (e-Procurement) Sistem Nasional, Pengelolaan Data Center, Biaya Operasional BTS Trunking (BHP Frekuensi, Listrik dan Sewa Lokasi), Sewa Mesin Fotocopy, Sewa Perangkat Lunak Mainframe dan Dukungan Pemeliharaan, Sewa Jaringan Internet Fiber Optic (FO), Sewa Link Jaringan Komunikasi WAN dan Bandwith Internet, Sewa DRC, Pemeliharaan Mainframe, Pengelolaan Router, Switch Gedung Balaikota, Gedung Kantor Pemerintah Kota/Kabupaten dan Dinas Teknis, Pemeliharaan RCU, LCU, Terminal dan Suku Cadang serta Pemeliharaan Server dan Suku Cadang, Sewa Operating System/Hardware/Software dan Jaringan Komputer SPGDT, Sewa Jaringan On Line System, Pemeliharaan dan Penyediaan Komponen APILL Sistem 1, 2, 3 dan Sistem ATCS, Penyediaan Internet ITS, Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional, Penyediaan Pelaksana Tugas Pekerja Lapangan MRLI serta Pengadaan Alat dan Materil Kerja Pendukung, Penyediaan Listrik Traffic Light dan Perangkat Pendukungnya se-Jakarta;
- s. Kegiatan Penyelenggaraan Rembug RW, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kota Administrasi dan Pendampingan Rembug RW, Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Secara Mobile, Peningkatan Fungsi RT, RW, LMK, Pelayanan Pengendalian dan Penjangkauan PMKS Tingkat Kota dan Kecamatan, Pengadaan Perkakas Kerja dan Seragam Kerja, Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Keamanan Kantor, Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Kebersihan Kantor;

- t. Dukungan Layanan Badan, Kantor dan Satlak PTSP, Pengembangan Call Center dan Komunikasi Masyarakat, Penyediaan Back Up Jaringan Pelayanan Publik Pengelolaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Pelaksanaan dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan (AJIB), Pembayaran Abodemen Call Center 112 BPBD Provinsi DKI Jakarta;
- u. Pembayaran Biaya (SPP) Pengiriman Pegawai Tugas Belajar, Pembayaran Sewa Tempat Pembelajaran, Penyelenggaraan Diklat (Penjabaran, Kepemimpinan dan Teknis Fungsional);
- v. Pengelolaan Kendaraan Dinas Khusus, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, Pengadaan Cetakan Kantor, Kegiatan Koneksi Jaringan Internet, Jasa Teknis Pendukung, Pemeliharaan Sarana Apung, Pengawasan dan Penilaian Dalam Rangka Pemberian Penghargaan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Gedung Sasana Krida Karang Taruna, Pengadaan Petty Stock Bencana dan Perlindungan Sosial, Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana, Piket dan Satgas Penanganan Perbaikan Sarana dan Prasarana Drainase, Pemeliharaan dan Operasional Pompa Stasioner, Pompa Mobile, Pintu Air dan Kelengkapannya, Pemeliharaan Rutin di Kanal Banjir Timur (KBT), Sewa Dedicated Link Command Centre, Sewa Jaringan GSM Pendukung Sistem Peringatan Dini Banjir, Sewa dan Operasional Helpdesk Command Centre Pengaduan Masyarakat, Penyediaan Tenaga Pelaksana Laboratorium, Pengelolaan Gedung Kantor, Penyediaan Jasa Mekanikal Elektrikal (ME), Belanja Perawatan Mekanikal Elektrikal, Pengelolaan Perangkat Jaringan, Pengelolaan Server, Respon Opini Publik, Pemeliharaan Pendukung TI, Pemeliharaan/Perawatan Penggantian Suku Cadang Sarana dan Prasarana Telekomunikasi, Pelaksanaan Operasional Media Online (Website), Penyediaan Operasional Radio FM, Penerbitan Buletin, Pengelolaan Kliping Berita, Pengadaan Pakan Ternak Percontohan, Pemeliharaan dan Perawatan Ternak Unggas, Jasa Penimbangan Sampah, Pemeliharaan Lift Kantor, Pemeliharaan AC, Penanganan dan Koordinasi Pengendalian Daerah Prioritas, Pelaksanaan STQ/MTQ, Penyediaan Operasional Distribusi Raskin, Penyediaan Operasional Kader Jumantik dan Posyandu, Pergerakan Masyarakat Dalam Rangka Kerja Bakti Lingkungan, Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Malam Hari, Pramusrenbang dan Musrenbang Kelurahan, Penyediaan Operator Komputer, Pembangunan Puskesmas, Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Manajemen Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Rumah Sakit (Manajemen Building), Peningkatan Operasional Layanan RS, Manajemen Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kalibrasi (Manajemen Aset), Diklat Prajabatan, Diklat Bendahara, Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Diklat Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Diklat Peningkatan Kapasitas Penjenjangan Dasar, Menengah dan Lanjutan, Penyelenggaraan Operasional Kantor Badan Diklat Provinsi DKI Jakarta, Pembiayaan

Penyertaan Modal Daerah Kepada PT MRT, Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Pembayaran Utang Pesangon Pegawai Eks UPBD PEMK Tahun 2015, Audit Laporan Keuangan UPDB PEMK per 31 Desember 2015, Akta Pendirian Koperasi Bagi Koperasi Ruusn, Pembayaran Utang Jasa Akuntan Penyusun Laporan Penutup UPBD PEMK per 31 Desember 2015, Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Dalam Rangka Persiapan Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016, Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendali Banjir, Pemeliharaan Penanggulangan Kerusakan Jalan dan Jembatan, Piket Satgas dan Perbaikan Jalan Rusak, Penataan dan Pengembangan Aplikasi SIPKD, Dukungan Teknis SI Aset, Perencanaan Basic Design Konstruksi Design and Build yang Bersifat Kompleks dan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi (MK) Untuk Pekerjaan Konstruksi Design and Build, Penyediaan Tenaga Teknis/Administrasi. Operasional Khusus Bidang Perhubungan, Pelaksanaan Seleksi Calon Pengurus BUMD, Rehab Total Puskesmas, Pengembangan Rumah Sakit, Rehab Gedung Sekolah;

- w. Kegiatan Pengamanan Kantor, Pelayanan Sosial Orang Terlantar, Penyediaan Permakanan WBS di Panti Sosial, Penanganan Segera Pemagaran dan Pengecatan Pagar Taman, Penambahan Sarana Taman Bermain, Pelaksanaan Sidang Konsultasi Bidang Perencanaan Bangunan Gedung Oleh Tim Ahli (TPAK, TPKB, TPIB), Penyediaan Konsumsi Dinas, Pengelolaan Administrasi Kantor dan Administrasi Ketatausahaan, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular, Pengendalian Hama Pest Control, Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan, Penyediaan Form Surat Penyediaan Dana (SPD) Tahun 2016, Pemeliharaan dan Pelestarian Ternak Rusa, Perawatan Sarana Prasarana dan Kebersihan Taman Monumen Nasional, Penopangan/Pemangkasan/Perawatan Pohon di Taman Monas dan Proklamator, Pengamanan di Kawasan Monumen Nasional dan Proklamator, Kebersihan Monas dan Proklamator, Operasional Kereta Wisata Monas, Pemeliharaan Plumbing Gedung Walikota, Pemeliharaan IPAL Gedung Walikota, Pemeliharaan Masjid Walikota, Kegiatan Fasilitasi Jakarta yang Kondusif, Aktualisasi Nilai-nilai Maulid Nabi Muhammad SAW Bagi Anggota Korpri, Aktualisasi Nilai-nilai Paskah Bagi Anggota Korpri, Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan, Penyediaan Sewa Meubelair, Penataan Ruang Front Office, Penyediaan Jasa Ekspedisi dan Pendistribusian Dokumen Perizinan dan Non Perizinan, Penyediaan Sewa Sarana Mobilitas, Penyediaan Dukungan Operasional Kantor, Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Kantor, Penataan Ruang Pelayanan, Swakelola Pengadaan Mesin Absensi Fingerprint Termasuk Instalasi Connecting ke BKD, Swakelola Pengadaan Cetakan Tiket Peron, Swakelola Survei dan Sertifikasi Kapal Milik UP. APK, Pelayanan Kapal Kepulauan Seribu, Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sistem Informasi/Teknologi Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor, Penyediaan BBM Genset Balaikota dan Rumah Dinas Pejabat, Penyediaan Makanan dan Minuman;

- x. Kegiatan Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Lainnya yang Bersifat Mendesak (Urgent), yang Dalam Pelaksanaannya Terlebih Dahulu Mendapat Persetujuan Tertulis dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
- y. Penyelesaian APBD Tahun Anggaran 2017; dan
- z. Diklat Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual, Produktivitas Pelaksanaan Assesment, Penanganan Psikososial Pasca Bencana, Pemeliharaan DIMS dan Pengelolaan Website BPBD, Pembayaran Abodemen dan Telepon Call Center 164 BPBD Provinsi DKI Jakarta, Pengelolaan Sebaran Informasi Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Melalui Media Tercetak dan Media Luar Ruang, Pemeliharaan PABX, Pengelolaan, Pengembangan Portal Resmi Jakarta, Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Jakarta Smart City, Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Bidang Pemerintahan dan Bidang Keuangan, Pengelolaan Dokumentasi dan Publikasi Kehumasan, Pengelolaan Data dan Penyediaan Informasi Publik, Pengembangan Infrastruktur TIK JSC, Penataan dan Pengembangan Aplikasi Aset, Penataan dan Pengembangan Aplikasi Kepegawaian, Penataan dan Pengembangan Aplikasi e-Kinerja, Penataan dan Pengembangan Aplikasi PTSP, Pengelolaan LAN Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, Penyediaan Penunjang Kendaraan Dinas, Penyediaan Kebutuhan Dasar Kantor, Dokumentasi dan Penyediaan Materi Kehumasan, Monitoring dan Analisis Berita di Media Online dan Media Sosial Secara Real Time, Pengelolaan Wall Display Monitoring Berita TV, Pengelolaan Pengamanan Jaringan Komunikasi Data (Pekerjaan : Warranty Perangkat Security), Pemeliharaan PC, Laptop dan Printer, Pelaksanaan Teknis TIK Bagi SKPD, Pengelolaan serta Penataan Jaringan Layanan Publik dan Aparatur di Kecamatan dan Kelurahan, Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Jakarta Selatan, Penyelenggaraan Komisioner Komisi Penyiaran dan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Penyelenggaraan Sekretariat Komisi Penyiaran dan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Kerumahtanggaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, Penyelenggaraan Penertiban Daerah Rawan Ketertiban Umum, Penyediaan Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Operasional, Pembinaan Jasmani (MFD) dan Rohani Anggota Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, Piket Asistensi dan Operator Radio, Pelaksanaan Piket Monitoring Tramtibum 1x24 jam Satpol PP, Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Kota Menuju Tingkat Provinsi, Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Daerah SD/SDLB, Pelaksanaan dan Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN), Olimpiade Siswa Terapan Nasional (OSTN), Pembinaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK, Pemilihan Kepala Sekolah, Pengawas dan Guru Berprestasi SD/SMP/SMA/SMK, Peningkatan Administrasi PKBM Negeri, Pelaksanaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Pelaksanaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK),



Uang Kehormatan LMK, Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kelurahan, Pemberian Makan Tambahan (PMT) Balita dan Lansia, Pergerakan Masyarakat dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), Piket Hari Sabtu Kelurahan, Pengendalian Penyakit HIV-AIDS, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Gangguan Kesehatan Jiwa, Peningkatan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Non PNS, Piket Jaga PUSDALDUKES Gawat Darurat dan Bencana, Penyusunan LKPJ Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016, Penyediaan Barang dan Jasa Transaksi Keuangan, Pengamanan Aset Saluran di Wilayah Jakarta Pusat, Peningkatan Turap Kali dan Saluran Penghubung di Wilayah Jakarta Pusat, Diklat Internship Integrated Urban Water Management (Sister City Jakarta Rotterdam), Pengelolaan Pengembangan e-Musrenbang, Pengembangan e-Monev, Penyediaan Jasa Layanan RPTRA, Penyediaan Surat Kabar, Seleksi dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Siswa SD Tingkat Provinsi Menuju Tingkat Nasional, Pengadaan Obat Vaksin, Penyediaan Dukungan Mobil Tangki, Pengadaan dan Pemasangan Meter Air, Pelaksanaan Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian, Jasa Pemandu Museum (Guide), Pelaksanaan Kunjungan Kerja Pejabat dan Staf, Koordinasi Lintas Sektoral Bidang Pengamanan (TNI/Polri), Penyelenggaraan Acara-acara Seremonial Pimpinan, Pelayanan Angkutan Perairan dan Kepelabuhan, Penilaian Status Ketaatan Lingkungan (SKL) dan Status Pencemaran Lingkungan, Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengkajian Kebijakan Lingkungan Hidup, Pengamanan Kantor Balaikota Dalam Mengantisipasi Aksi Unjuk Rasa, Penunjang Kelancaran Tugas Umum Pemerintahan, Posko Bersama Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017, Kegiatan Fasilitasi Jakarta yang Kondusif, Kegiatan Posko Bersama Pemilihan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017.

#### Pasal 2

- (1) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan pembayaran berdasarkan hasil perhitungan teknis yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) ditetapkan setinggi-tingginya 1/12 (satu per dua belas) dari anggaran belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016.

#### Pasal 3

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, harus disesuaikan kembali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila :

- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan diundangkan dalam Lembaran Daerah; dan
- b. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur dan diundangkan dalam Berita Daerah.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku sampai dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 21045

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003